

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ikhsan. 2015, *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang Di Kota Serang Banten*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Saifudin. 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beratha, I. Nyoman. 1991, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- HAW, Widjaja. 2004, *Kewenangan Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irawan, Nata. 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Iskandar, Pranoto. 2012, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur.
- Juliantara, Dadang. 2002, *Pembaruan Desa Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Kaloh, DR J. 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Asi Mahasatya, Jakarta.
- Marbun, S.F. *et al.* ,1981, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu . 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Pamudhi, S. 1982, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Peter Salim dan Yunny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

- Prasadja, Budi. 1980, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Pratikno, *et al.* , 2002, *Komnas HAM 1998-2001 Pergulatan Dalam Transisi Politik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Priyono, B. Herry. *et al.* , 2012, *Kratos Minus Demos*, BAKUMSU, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya di Indonesia*, Fakultas Hukum UMY & Devisi Publikasi Penerbitan LP3M UMY, Yogyakarta.
- Setiawan, Hariadi B. 1995, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suryaningkrat, Bayu. 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutisna. Agus. 2017, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit!*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Widodo, Dwi Rustiono, *et al.* , 2010, *Wajah DPR Dan DPD 2009-2014 Latar Belakang Pendidikan Dan Karakter*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Winardi, 1988, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Tarsito, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia).

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun 2017)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015).

Internet

Bayu Hermawan, *KPK: Jangan Pilih Kepala Daerah Dai Dinasti Politik* <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/03/ohkj63354-kpk-jangan-pilih-kepala-daerah-dari-dinasti-politik>, 30 Juni 2018.

Fitria Rahmawati, *Kata Bambang Widjojanto Soal Jabatan 2 Periode Berpotensi Korupsi*, <https://pilkada.tempo.co/read/1079767/kata-bambang-widjojanto-soal-jabatan-2-periode-berpotensi-korupsi>, 30 Juni 2018.

H. Nur, "Politik Dinasti (Studi Kasus Kemenangan Samidin Dalam Pilkades di Desa Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang)", diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/6385/>, 28 Juni 2018.

- Inke Hilarie Dinesia, *Geliat Politik Dinasti Di Pilkada 2018*, <https://kumparan.com/@kumparannews/geliat-politik-dinasti-di-pilkada-2018>, 29 Juni 2018.
- Iqbal Kautsar, “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia”, diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=88324&obyek_id=4, 28 Juni 2018.
- J. Kristiadi, *Analisis Politik J. Kristiadi, “Politik Dinasti, Sebab Atau Akibat?”*, <https://printsatimedia.wordpress.com/2015/07/21/analisis-politik-j-kristiadi-politik-dinasti-sebab-atau-akibat/amp/>, 5 Juli 2018 pukul 21.57 WIB.
- Muhammad Hafil, *Bambang Widjojanto Singgung Agus Soal Korupsi Dan Dinasti Politik*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/19/ok0yuk326-bambang-widjojanto-singgung-agus-soal-korupsi-dan-dinasti-politik>, 30 Juni 2018.
- Samrut Lellolsima, *Politik Dinasti Suburkan Korupsi*, <http://politik.rmol.co/read/2018/02/19/327303/Politik-Dinasti-Suburkan-Korupsi->, 29 Juni 2018.
- Samsul Komar, “Dinasti Kepala Desa (Studi Tentang Survivabilitas Dinasti Politik di Desa Puput Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah)”, diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=64948&obyek_id=4, 28 Juni 2018.
- Zunita Amalia Putri, *KPK Sebut Fakta Dari OTT, Dinasti Politik Lekat Dengan Korupsi*, <https://news.detik.com/berita/d-3894436/kpk-sebut-fakta-dari-ott-dinasti-politik-lekat-dengan-korupsi>, 30 Juni 2018.